



SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan digunakan dalam pemberkasan Arsip untuk pengelolaan Arsip Dinamis.
- (2) Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggunakan Kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

Pasal 3

Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 835

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,



Latief Nurbana
NIP. 19620607 198711 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN

KLASIFIKASI ARSIP

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

A FASILITATIF

I KP KEPEGAWAIAN

- 00 *Bezetting*/Persediaan Pegawai
Naskah yang berkaitan dengan *bezetting*/persediaan pegawai.
- 01 Formasi Pegawai
 - 00 Usulan Unit Kerja
Naskah yang berkaitan dengan usulan formasi yang diajukan dari unit kerja.
 - 01 Usulan Formasi
Naskah yang berkaitan dengan usulan formasi termasuk di dalamnya rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan, naskah yang berkaitan dengan usulan formasi yang diajukan dari unit kerja.
 - 02 Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Naskah yang berkaitan dengan usulan formasi yang diajukan dari unit kerja.
 - 03 Persetujuan Formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Naskah yang berkaitan dengan persetujuan formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - 04 Penetapan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi ASN.
 - 05 Penetapan Formasi Khusus
Naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi khusus, termasuk di dalamnya usulan formasi khusus.
 - 06 Penetapan Penempatan Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Naskah yang berkaitan dengan penetapan penempatan CPNS di unit kerja.
- 02 Pengadaan Pegawai
 - 00 Proses Penerimaan Pegawai
Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai, mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan pengumuman penerimaan.
 - 01 Penetapan Pengumuman Kelulusan
Naskah yang berkaitan dengan penetapan pengumuman kelulusan pegawai.
 - 02 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
Naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima.
 - 03 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)
Naskah yang berkaitan dengan nota usulan dan kelengkapan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

- 04 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih dari 2 (Dua) Tahun
Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS/CASN menjadi PNS/ASN mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan.
- 05 Surat Keputusan CPNS/CASN dan PNS/ASN Kolektif
Naskah yang berkaitan proses CPNS/CASN dan PNS/ASN Kolektif
- 06 Prajabatan
Naskah yang berkaitan proses pelaksanaan prajabatan.

- 03 Pembinaan Karir Pegawai
 - 00 Penilaian Prestasi Kerja
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian Prestasi Kerja termasuk di dalamnya pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional tertentu.
 - 01 Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
 - 02 Pembinaan Mental
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan mental pegawai termasuk di dalamnya ceramah keagamaan.
 - 03 Hukuman Disiplin
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengan proses pemberian hukuman disiplin.

- 04 Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan
 - 00 Ujian Penyesuaian Ijazah
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai.
 - 01 Ujian Dinas
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan ujian dinas bagi pegawai.

- 05 Ujian Kompetensi
 - 00 *Assesment Test* Pegawai
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan *Assesment Test* pegawai.
 - 01 *Pemetaan/Talent Mapping* Pegawai
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan *Pemetaan/Talent Mapping* pegawai.

- 06 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai
Naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai.

- 07 Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
Naskah yang berkaitan dengan proses penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai.

- 08 Mutasi Pegawai
 - 00 Kenaikan Pangkat/Golongan
Naskah yang berkaitan dengan proses kenaikan pangkat/golongan pegawai.
 - 01 Kenaikan Gaji Berkala
Naskah yang berkaitan dengan proses kenaikan gaji berkala.
 - 02 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Unit Kerja
Naskah yang berkaitan dengan proses alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar unit kerja.

- 03 Rotasi Kerja
Naskah yang berkaitan dengan proses rotasi kerja pegawai.
- 04 Penyesuaian Masa Kerja
Naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.
- 05 Penyesuaian Tunjangan Keluarga
Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
- 06 Penyesuaian Kelas Jabatan
Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian kelas jabatan sehubungan dengan perubahan jabatan pegawai.
- 07 Mutasi Keluarga
Naskah yang berkaitan dengan proses mutasi data keluarga termasuk pernikahan/perceraian, kelahiran anak, adopsi anak, meninggal dunia pegawai.

- 09 Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural
 - 00 Pengangkatan Jabatan Struktural
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural termasuk di dalamnya pelantikan.
 - 01 Pemberhentian Jabatan Struktural
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural.

- 10 Pendelegasian Wewenang
 - 00 Pelaksana Tugas (Plt)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.
 - 01 Pelaksana Harian (Plh)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).

- 11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 - 00 Program Diploma
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program diploma.
 - 01 Program Sarjana
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program sarjana.
 - 02 Program Pasca Sarjana
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program pasca sarjana.
 - 03 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
Naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan penjenjangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi diklat penjenjangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV.
 - 04 Kursus/Diklat Fungsional
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat fungsional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus/diklat fungsional.
 - 05 Kursus/Diklat Teknis
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat teknis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus/diklat teknis.

- 06 Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan orientasi CPNS/CASN seperti Diklat Dasar Kearsipan, pembekalan CPNS/CASN, dan program magang CPNS/CASN di unit kerja.
- 12 Administrasi Pegawai
 - 00 Data Pegawai
Naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.
 - 01 Kartu Pegawai
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.
 - 02 Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan KARIS/KARSU.
 - 03 Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu TASPEN.
 - 04 Kartu Jaminan Kesehatan
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan tentang kartu jaminan kesehatan.
 - 05 Tanda Jasa
Naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai.
 - 06 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan KP4.
 - 07 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan LHKPN dan LHKASN.
 - 08 Tunjangan Kinerja dan Uang Makan
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan pegawai.
 - 09 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Naskah yang berkaitan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
 - 10 Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat)
Naskah yang berkaitan dengan berkas Baperjakat.
- 13 Cuti Pegawai
 - 00 Cuti Besar
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti besar.
 - 01 Cuti Tahunan
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti tahunan.
 - 02 Cuti Sakit
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti sakit.
 - 03 Cuti Bersalin
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti bersalin.
 - 04 Cuti Alasan Penting
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti karena alasan penting.
 - 05 Cuti Bersama
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti bersama.
 - 06 Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan CLTN.
- 14 Pembinaan Jabatan Fungsional dan Jabatan Administrator
 - 00 Pengangkatan Jabatan Fungsional (JF)
Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan JF keahlian dan JF keterampilan.
 - 01 Kenaikan Jenjang dan Alih Jabatan Fungsional (JF)
Naskah yang berkaitan dengan jenjang dan alih JF keahlian dan JF keterampilan.
 - 02 Pemindahan Jabatan Fungsional (JF)
Naskah yang berkaitan dengan pemindahan JF keahlian dan JF keterampilan.

- 03 Pemberhentian Jabatan Fungsional (JF)
Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian JF keahlian dan JF keterampilan termasuk di dalamnya pemberhentian sementara.
 - 04 Pengangkatan Jabatan Administrator (JA)
Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
 - 05 Kenaikan Jenjang dan Alih Jabatan Administrator (JA)
Naskah yang berkaitan dengan jenjang dan alih jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
 - 06 Pemindahan Jabatan Administrator (JA)
Naskah yang berkaitan dengan pemindahan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana termasuk di dalamnya pemberhentian sementara.
- 15 Kesejahteraan Pegawai
- 00 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
Naskah yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai meliputi penyelenggaraan kesehatan pegawai dari aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif seperti *medical check-up* PNS/ASN dan PNS/CASN, serta kegiatan peningkatan wawasan kesehatan.
 - 01 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai
Naskah yang berkaitan dengan pelayanan asuransi pegawai.
 - 02 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan (Taperum)
Naskah yang berkaitan dengan Tabungan Perumahan.
 - 03 Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial
Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, dan sumbangan lainnya.
 - 04 Berkas tentang Pakaian Dinas
Naskah yang berkaitan dengan pakaian dinas pegawai.
 - 05 Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah
Naskah yang berkaitan dengan layanan pengurusan jenazah pegawai
- 16 Pemberhentian Pegawai
- 00 Pemberhentian dengan Hormat
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pensiun termasuk di dalamnya pensiun/duda/janda/anak dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).
 - 01 Pemberhentian dengan Tidak Hormat
Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian.
- 17 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
Naskah yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa kepegawaian.
- 18 Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai non Pegawai Negeri Sipil (pegawai kontrak, honorer, dan lain-lain)/PPPK.
- 19 Organisasi Non Kedinasan
- 00 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
 - 01 Darma Wanita
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Darma Wanita Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

- 02 Koperasi
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Koperasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
 - 03 Lain-lain
Naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya.
- 20 Berkas Perseorangan Pegawai
- 00 Berkas Perseorangan PNS/ASN
Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan PNS/ASN mulai lamaran sampai dengan pensiun pegawai.
 - 01 Non PNS/PPPK
Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Non PNS/PPPK mulai lamaran sampai dengan berhenti.
- II KU KEUANGAN
- 00 Pelaksanaan Anggaran
- 00 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Naskah yang berkaitan dengan pengajuan formulir pembiayaan kegiatan/Rencana Anggaran Belanja (RAB).
 - 01 Penggajian
Naskah yang berkaitan dengan penggajian pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.
 - 02 Pengeluaran Anggaran
Naskah yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran, meliputi pelaksanaan anggaran keluaran, baik yang berupa petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan APBN sampai dengan semua berkas pengajuan pencairan dana sampai terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - 03 Belanja Barang Habis Pakai
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembelanjaan barang habis pakai dari proses awal sampai pencairan anggaran.
 - 04 Belanja Barang Inventaris
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembelanjaan barang inventarisasi dari proses awal sampai pencairan anggaran.
 - 05 Belanja Jasa
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan belanja jasa dari proses awal sampai pencairan anggaran.
- 01 Pengelolaan Perbendaharaan
- 00 Perbendaharaan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan, seperti Surat Keputusan Pengangkatan Kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran.
 - 01 Kartu Pengawasan Kredit
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kartu pengawasan kredit.
 - 02 Pengembalian Belanja
Naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, meliputi kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan pengembalian belanja yang melampaui tahun anggaran berjalan melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
 - 03 Berita Acara Pemeriksaan Kas
Naskah yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan kas, meliputi kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.
 - 04 Tuntutan Ganti Rugi
Naskah yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, meliputi kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa tuntutan ganti rugi.

- 05 Pembukuan Anggaran
Naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan.
- 06 Daftar Gaji
Naskah yang berkaitan dengan daftar gaji pegawai.
- 02 Verifikasi Anggaran
Naskah yang berkaitan dengan verifikasi anggaran yaitu kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.
- 03 Akutansi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran dan pelaporan berupa Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
 - 00 Laporan Kas
Naskah yang berkaitan dengan laporan kas, meliputi perhitungan anggaran dan pelaporan berupa Laporan Kas, Kas/Register Penutupan Kas, LRA, Neraca, CALK, termasuk Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Pendapatan Negara, Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA), bulanan/triwulan/semester, Berita Acara Pemeriksaan.
 - 01 Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
 - 02 Laporan Keuangan Tahunan
Naskah yang berkaitan dengan laporan keuangan tahunan, meliputi perhitungan anggaran dan pelaporan berupa laporan keuangan, LRA, neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Barang Milik Negara (BMN), Laporan Realisasi Pendapatan Negara, dan CALK.
- 04 Ketatausahaan Keuangan
 - 00 Keterangan Penghasilan
Naskah yang berkaitan dengan keterangan penghasilan.
 - 01 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan SKPP.
 - 02 Permohonan Pinjaman
Naskah yang berkaitan dengan permohonan pinjaman.
 - 03 Iuran Keanggotaan Organisasi
Naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi, baik tingkat nasional maupun internasional, mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai pelaporan.
- 05 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
 - 00 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi.
 - 01 Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), dan Surat Perintah Membayar (SPM)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - 02 Laporan Realisasi Bulanan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)/Triwulan/Semester
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan Laporan Realisasi Bulanan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)/Triwulan/Semester.

- 06 Pertanggungjawaban Keuangan Negara
 - 00 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berupa perhitungan anggaran dan pelaporan berupa Laporan Keuangan, LRA, Neraca dan CALK.
 - 01 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat.
 - 02 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan laporan aparat pemeriksa fungsional berupa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), MHP, Tindak Lanjut/Tanggapan LHP.
 - 03 Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian kerugian keuangan Negara berupa Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

III PR

PERENCANAAN

- 00 Perencanaan Program
 - 00 Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan mulai tahap perencanaan sampai dengan penetapan kebijakannya.
 - 01 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP.
 - 02 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM.
 - 03 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, yang terdiri dari berkas penyusunan Renstra, dan dokumen Renstra.
 - 04 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RKP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
 - 05 Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Renja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, terdiri dari berkas kegiatan *multilateral meeting*, berkas kegiatan *bilateral meeting*, berkas *trilateral meeting*, dokumen *trilateral meeting*, dokumen Renja.
 - 06 Dokumen Penetapan/Kontrak Kinerja
Naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung terdiri dari Kontrak Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
 - 07 Dokumen Rencana Terpadu Program Kemaritiman Lintas Kementerian/Lembaga
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan, dan penyerasian rencana terpadu program kemaritiman lintas Kementerian/Lembaga.
- 01 Perencanaan Anggaran
 - 00 Kebijakan/Peraturan Penganggaran
Naskah yang berkaitan dengan kebijakan/peraturan penganggaran berupa penyusunan anggaran, Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Standar Biaya Keluaran, dokumen Arah Kebijakan Pemerintah, dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Hasil Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah, Risalah Rencana Dana Pengeluaran dengan DPR, dan lain-lain.

- 01 Dokumen Penyusunan Pagu Indikatif
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Pagu Indikatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, terdiri dari dokumen usulan pemutakhiran *baseline* dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, data pemutakhiran *baseline*, Surat Edaran Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional dan Kementerian Keuangan terkait perihal penetapan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga.
- 02 Dokumen Penyusunan Pagu Anggaran
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan pagu anggaran, terdiri dari Surat Menteri Keuangan terkait penetapan pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Dokumen Berita Acara Penelaahan Pagu Anggaran.
- 03 Dokumen Penyusunan Alokasi Anggaran
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan alokasi anggaran, terdiri dari Surat Menteri Keuangan terkait penetapan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Alokasi Anggaran, Dokumen Berita Acara Penelaahan Pagu Anggaran, DIPA Induk, DIPA Petikan.
- 04 Dokumen Revisi Anggaran
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan revisi anggaran, baik revisi anggaran yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdiri dari usulan revisi dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, surat usulan revisi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dokumen pendukung usulan revisi, surat undangan penelaahan revisi, surat perintah/nota dinas penelaahan revisi, DIPA petikan setelah revisi, Petunjuk Operasional Kegiatan perubahan revisi.
- 05 Dokumen Usulan Anggaran Sebelum Pagu Indikatif (Inisiatif Baru)
Naskah yang berkaitan dengan usulan anggaran (inisiatif baru) sebelum ditetapkannya pagu indikatif. Dokumen ini terdiri dari dokumen usulan dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, surat usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas, dokumen pendukung usulan berupa *Term of Reference* dan Rencana Anggaran Biaya.
- 06 Dokumen Usulan Anggaran Sebelum Pagu Anggaran (Inisiatif Baru)
Naskah yang berkaitan dengan usulan anggaran (inisiatif baru) sebelum ditetapkannya Pagu Anggaran. Dokumen ini terdiri dari dokumen usulan dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, surat usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas, dokumen pendukung usulan anggaran berupa TOR dan RAB.
- 07 Dokumen Usulan Anggaran Sebelum Alokasi Anggaran (Inisiatif Baru)
Naskah yang berkaitan dengan usulan anggaran (inisiatif baru) sebelum ditetapkannya alokasi anggaran. Dokumen ini terdiri dari dokumen usulan dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, surat usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas, dokumen pendukung usulan anggaran berupa TOR dan RAB.

- 08 Dokumen Usulan Tambahan Anggaran (ABT) pada Tahun Berjalan
Naskah yang berkaitan dengan usulan anggaran (inisiatif baru) pada saat tahun berjalan. Dokumen ini terdiri dari dokumen usulan dari unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, surat usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas, dokumen pendukung usulan anggaran berupa TOR dan RAB, surat undangan penelaahan Usulan Tambahan Anggaran dari Kementerian Keuangan, surat perintah dan berita acara penelaahan, DIPA petikan perubahan anggaran.
- 09 Dokumen Usulan Standar Biaya Keluaran (SBK)
Naskah yang berkaitan dengan usulan SBK yang terdiri dari surat usulan SBK kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, surat undangan penelaahan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Surat Perintah Penelaahan, Berita Acara Penelaahan Usulan SBK.
- 02 Laporan
 - 00 Laporan Bulanan ke Presiden
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan bulanan ke Presiden.
 - 01 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan LAKIP.
 - 02 Laporan Insidental
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan insidental lembaga/instansi.
 - 03 Penyiapan Bahan Nota Keuangan
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan nota keuangan yang terdiri dari surat permintaan masukan/koreksi *draft* nota keuangan dari Sekretaris Kabinet, usulan/masukan bahan nota keuangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, dokumen nota keuangan.
 - 04 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pengadaan.
 - 05 Laporan ke Kantor Staf Presiden (KSP)
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan ke Kantor Staf Presiden.
 - 06 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Anggaran dan Kinerja
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, anggaran dan kinerja.
 - 07 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Survei Kemaritiman
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan survei kemaritiman.
 - 08 Laporan Triwulan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan triwulan ke Bappenas.
 - 09 Penyiapan Bahan Permintaan Data dari Instansi Lain
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan permintaan data dari instansi lain terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- 03 Evaluasi Program
 - 00 Evaluasi Program Unit Kerja
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi program unit kerja.
 - 01 Evaluasi Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi program kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

- IV HK HUKUM
 - 00 Program Legislasi
 - 00 Program Legislasi terkait Kemaritiman
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi terkait kemaritiman.
 - 01 Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - 00 Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diprakarsai oleh Kementerian/Lembaga di bawah di koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
 - 01 Rancangan Peraturan Pemerintah
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang diprakarsai oleh Kementerian/Lembaga di bawah di koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
 - 02 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan/atau Kementerian/Lembaga di bawah di koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
 - 03 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sejak tahap rencana penyusunan/pengajuan sampai dengan pengundangan.
 - 04 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sejak tahap rencana penyusunan/pengajuan sampai dengan ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
 - 02 Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
 - 00 Dalam Negeri
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*/kontrak/perjanjian kerja sama dalam negeri dari proses perencanaan sampai penandatanganan kerjasama.
 - 01 Luar Negeri
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*/kontrak/perjanjian kerja sama luar negeri dari proses perencanaan sampai penandatanganan kerjasama.
 - 03 Dokumentasi Hukum
 - 00 Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum dan penyebarluasan informasi hukum.
 - 01 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum dalam rangka penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.
 - 02 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemberian bantuan/konsultasi hukum/advokasi bidang litigasi dan non litigasi.

- 04 Kasus/Sengketa Hukum di Bidang Litigasi dan Non Litigasi
 - 00 Pidana
Naskah, telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan proses kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, pembelaan serta upaya dan bantuan hukum sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
 - 01 Perdata
Naskah, telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan proses kasus perdata.
 - 02 Tata Usaha Negara
Naskah, telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan proses kasus Tata Usaha Negara (TUN).
 - 03 Non Litigasi
Naskah, telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan proses tentang kasus non litigasi.
- 05 Telaah Hukum
 - 00 Telaah Hukum Internal
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
 - 01 Telaah Hukum Eksternal
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan pejabat berwenang Instansi lain.
 - 02 Telaah Perjanjian
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan kontrak, perjanjian, dan kerja sama.
 - 03 Telaah Akta
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan akta, dan berita acara.
- 06 Penghargaan kelembagaan
Naskah yang berkaitan dengan proses pemberian penghargaan kelembagaan.
- 07 Pembinaan Hukum
 - 00 Sosialisasi/*Workshop*/Penyuluhan Bidang Hukum
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi/*workshop*/penyuluhan bidang hukum.
 - 01 Supervisi Bidang Hukum
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi bidang hukum
- 08 Instruksi/Surat Edaran
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan instruksi/surat edaran suatu permasalahan.
- 09 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional mulai rancangan awal sampai dengan penetapan.

V OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

00 Organisasi

00 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Naskah yang berkaitan dengan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, meliputi analisis dan evaluasi serta penyempurnaan struktur organisasi baik terhadap pembentukan, perubahan maupun pembubaran.

01 Analisis Organisasi
Naskah yang berkaitan dengan analisis organisasi.

02 Evaluasi Organisasi
Naskah yang berkaitan dengan evaluasi organisasi yaitu proses perubahan dan penyempurnaan organisasi.

01 Analisis Jabatan

00 Analisis Jabatan Struktural
Naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan struktural meliputi penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan struktural.

01 Analisis Jabatan Fungsional Tertentu
Naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan fungsional tertentu meliputi penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional tertentu.

02 Analisis Jabatan Fungsional Umum
Naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan fungsional umum penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional umum.

02 Standar Kompetensi

00 Standar Kompetensi Jabatan Struktural
Naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan struktural.

01 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
Naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan fungsional.

03 Analisis Beban Kerja (ABK)

Naskah yang berkaitan dengan pengukuran beban kerja jabatan dan unit kerja serta pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja.

04 Tata Laksana

00 Penyusunan dan Penyelarasan Proses Bisnis
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penyelarasan proses bisnis.

01 Evaluasi Proses Bisnis
Naskah yang berkaitan dengan evaluasi proses bisnis.

02 Penyusunan dan Penyelenggaraan Prosedur Operasional Standar (POS)
Naskah yang berkaitan dengan Prosedur Operasional Standar (POS), meliputi prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis tentang kegiatan rutin yang dapat dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram dan alur kerja (*flowchart*).

03 Monitoring Evaluasi Prosedur Operasional Standar (POS)
Naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi penerapan Prosedur Operasional Standar (POS) di unit kerja.

04 Reformasi Birokrasi
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang meliputi; manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas layanan publik.

- 05 Evaluasi Jabatan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

VI KA PERSURATAN & KEARSIPAN

- 00 Administrasi Persuratan
 - 00 Kartu Kendali
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses persuratan dengan kartu kendali.
 - 01 Buku Agenda
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pengelolaan surat dengan menggunakan buku agenda.
 - 02 Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi/Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip
Naskah yang berkaitan dengan lembar pengantar/buku ekspedisi/formulir/catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen/ arsip.
 - 03 Pengurusan Surat Masuk
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan surat masuk meliputi kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.
 - 04 Pengurusan Surat Keluar
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.
- 01 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 00 Penyusunan Sistem
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis, meliputi petunjuk pelaksanaan dan persetujuan Jadwal Retensi Arsip.
 - 01 Pembinaan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi penilaian angka kredit arsiparis tingkat instansi, lomba tertib arsip, penilaian arsiparis berprestasi dan bimbingan teknis, apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan, supervisi kearsipan.
 - 02 Monitoring
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pengelolaan arsip dinamis pada unit kerja.
- 02 Pengelolaan Arsip
 - 00 Penataan, Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengolahan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif mulai dari penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.
 - 01 Peminjaman Arsip
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman arsip aktif di *central file* dan/atau arsip inaktif di *record center*.
- 03 Penyusutan Arsip
 - 00 Pemindahan Arsip Inaktif
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan.
 - 01 Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna.
 - 02 Penyerahan Arsip Statis
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis.

- 04 Evaluasi Sistem Kearsipan
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem kearsipan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan evaluasi sistem kearsipan.

VII RT KETATAUSAHAAN DAN RUMAH TANGGA

00 Fasilitas Kantor

00 Fasilitas Kendaraan Dinas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan perbaikan, serta laporan kehilangan kendaraan.

01 Fasilitas Gedung/Ruang Rapat/Konsumsi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan fasilitas gedung/ruang rapat/konsumsi berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.

02 Pemakaian Telepon, Internet, Listrik, Air

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telepon, internet, listrik, air.

03 Administrasi Pemeliharaan Gedung dan Taman

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses administrasi pemeliharaan gedung dan taman.

04 Administrasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor meliputi perbaikan, instalasi dan pengawasan instalasi.

05 Administrasi Pengadaan Alih Daya

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pengadaan alih daya.

01 Perjalanan dinas

00 Perjalanan Dinas Luar Negeri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan *passport*, visa dan tiket pesawat.

01 Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam negeri termasuk pengurusan berkas dan tiket pesawat.

02 Ketertiban dan Keamanan

00 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor, serta Rumah Dinas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan, penjagaan, dan pengawasan terhadap pejabat, kantor, serta rumah dinas seperti daftar piket satuan pengamanan/*security*, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan pengaturan perparkiran termasuk kartu parkir.

01 Pemantauan dan Pelaporan Ketertiban dan Keamanan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan pelaporan ketertiban dan keamanan seperti kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan gangguan.

VIII PL PERLENGKAPAN

00 Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

00 Analisis Kebutuhan Unit Kerja

Naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja.

01 Tata Ruang

Naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor.

- 02 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
Naskah yang berkaitan dengan Daftar Rekanan Mampu (DRM) perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
- 01 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 00 Barang Habis Pakai/Alat Tulis Kantor
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang habis pakai/ATK dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 01 Perlengkapan Kantor
Naskah yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan kantor seperti komputer, laptop, meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas dan lain sebagainya dari proses awal sampai BAST.
 - 02 Tanah dan Bangunan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan aset/kekayaan (sertifikat, izin mendirikan bangunan), dan rumah dinas dari proses awal sampai BAST.
 - 03 Kendaraan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan) dari proses awal sampai BAST.
 - 04 Telaahan Pelaksanaan Lelang/Pemilihan/Penunjukan Langsung
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan telaahan pelaksanaan lelang/pemilihan/penunjukan langsung.
 - 05 Dokumen Lelang
Naskah yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan lelang/pemilihan/penunjukan langsung seperti barang inventaris kantor/barang bergerak, penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang maupun barang investasi (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang).
 - 06 Instalasi/Jaringan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, *Local Area Network* (LAN), dan sebagainya dari proses awal sampai BAST.
 - 07 Peralatan Kearsipan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan kearsipan seperti perangkat laboratorium, boks, rak, film dan lain lain dari proses awal sampai BAST.
 - 08 Jasa Profesi
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa profesi dari proses awal sampai BAST.
 - 09 Sewa
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan sewa dari proses awal sampai BAST.
 - 10 Jasa Akomodasi
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa akomodasi dari proses awal sampai BAST.
 - 11 Jasa Lainnya
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa lainnya dari proses awal sampai BAST.
- 02 Penyimpanan Barang dan Distribusi
 - 00 Penyimpanan Inventaris Kekayaan Negara
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan inventaris kekayaan negara untuk kepentingan internal maupun eksternal seperti surat bukti barang masuk, surat bukti pengeluaran barang.
 - 01 Pendistribusian
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendistribusian barang.

- 03 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
 - 00 Pembukuan BMN
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan BMN seperti daftar barang kuasa/pengguna, kartu identitas barang.
 - 01 Daftar Barang Ruang
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses identifikasi daftar barang yang ada pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
 - 02 Inventarisasi BMN
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi BMN pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, termasuk perencanaan sampai laporan hasil inventarisasi.
 - 03 Penghapusan BMN
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN sejak persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk berita acaranya.
 - 04 Pelaporan BMN
Naskah yang berkaitan dengan pelaporan BMN.
 - 05 Sertifikasi BMN
Naskah yang berkaitan dengan sertifikasi BMN yaitu kegiatan Penetapan status penggunaan BMN.

- 04 Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Negara (BMN)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan/perawatan BMN meliputi pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan *server/hosting*, perbaikan/*service* kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.

IX HM KEHUMASAN

- 00 Administrasi Kegiatan Keprotokolan
 - 00 Penyelenggaraan Acara Kedinasan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan acara kedinasan termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan.
 - 01 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri.
 - 02 Agenda Pimpinan
Naskah yang berkaitan dengan agenda pimpinan termasuk kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan.
 - 03 Dokumen *Memorandum of Understanding* dan Kerjasama
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* dan Kerjasama.
 - 04 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan dan Acara Kedinasan Dalam Bentuk Video dan Foto
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan dan acara kedinasan dalam bentuk video atau foto.
- 01 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan
Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kelembagaan meliputi kegiatan dokumentasi (pemotretan dan pengambilan gambar) dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.
- 02 Hubungan antar Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah
 - 00 Hubungan antar Lembaga Pemerintah
Naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga pemerintah.
 - 01 Hubungan dengan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Naskah yang berkaitan dengan organisasi sosial atau LSM.

- 02 Hubungan dengan Badan Usaha
Naskah yang berhubungan dengan Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta serta Koperasi).
 - 03 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Naskah yang berhubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL).
 - 04 Forum Kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia).
 - 05 Hubungan dengan Media Massa
Naskah yang berhubungan dengan media massa.
-
- 03 Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat dengan DPR RI.
 - 04 Bahan/Materi Pidato/Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kabinet, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan/materi pidato/sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kabinet, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 05 Dokumentasi dan Penerbitan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan pengambilan gambar video) dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.
 - 06 Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan *website*.
 - 07 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan.
 - 08 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi dalam bidang kemaritiman.
 - 09 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, dan Permohonan Maaf
Naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, dan permohonan maaf.

X LT PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

00 Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

00 Administrasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan administrasi penelitian, pengkajian dan pengembangan meliputi kegiatan pelaksanaan administrasi penelitian, pengkajian dan pengembangan mulai dari rencana kerja, kerangka acuan kegiatan/proposal, pembentukan tim kerja, dan surat menyurat.

01 Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan kegiatan proses hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan mulai rancangan awal sampai dengan akhir termasuk catatan-catatan perkembangan dan rekaman kegiatan.

02 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan.

03 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan.

04 Forum Komunikasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum komunikasi penelitian, pengkajian dan pengembangan.

05 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Pelatihan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan seminar, lokakarya, temukarya, pelatihan penelitian, pengkajian dan pengembangan.

01 Data dan Informasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

00 Data Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi penelitian, pengkajian dan pengembangan.

01 Informasi Statistik Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan informasi statistik penelitian, pengkajian dan pengembangan.

02 Jurnal Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan jurnal hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan.

02 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan.

XI PP PERPUSTAKAAN

00 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka

00 Penerimaan Koleksi Deposit Bahan Pustaka

Naskah yang berkaitan dengan penerimaan koleksi deposit bahan pustaka berupa bukti penerimaan koleksi deposit bahan pustaka.

01 Pengolahan Deposit Bahan Pustaka

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan deposit bahan pustaka.

01 Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka

00 Buku Induk Koleksi

Naskah yang berkaitan dengan buku induk koleksi.

01 Daftar Buku Terseleksi

Naskah yang berkaitan dengan daftar buku terseleksi yang meliputi buku terseleksi, buku dalam pemesanan, buku dalam permintaan, penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah.

02 Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus

Naskah yang berkaitan dengan daftar pengiriman bahan pustaka surplus.

- 03 Lembar Kerja Pengolahan BP (Boram, Pengkatalogkan)
Naskah yang berkaitan dengan lembar kerja pengolahan BP (Boram, Pengkatalogkan).
 - 04 *Shelt List*/Jajaran Kartu Utama (*master list*)
Naskah yang berkaitan dengan *shelt List*/Jajaran Kartu Utama (*master list*).
 - 05 Daftar Tambahan Buku (*Assesion list*)
Naskah yang berkaitan dengan daftar tambahan buku (*assesion list*).
 - 06 Daftar/Jajaran Kendali (Subyek dan Pengarang)
Naskah yang berkaitan dengan daftar/jajaran kendali (subyek dan pengarang).
- 02 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
- 00 Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka
Naskah yang berkaitan dengan data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka.
 - 01 Pertanyaan Rujukan dan Jawaban
Naskah yang berkaitan dengan pertanyaan rujukan dan jawaban.
- 03 Preservasi Bahan Pustaka
- 00 Survei Kondisi Bahan Pustaka
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan survei kondisi bahan pustaka.
 - 01 Repografi Bahan Pustaka
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan repografi bahan pustaka.
- 04 Pembinaan Perpustakaan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perpustakaan seperti bimbingan teknis, penyuluhan, dan sosialisasi.

XII TI TEKNOLOGI INFORMASI

- 00 Rencana Strategis/*Master Plan* Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
 - 00 Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi arsitektur dan implementasi meliputi Sistem Informasi Manajemen (SIM), Sistem Aplikasi, dan Infrastruktur.
 - 01 Perekaman dan Pemutakhiran Data
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perekaman dan pemutakhiran data mulai formulir isian, daftar petugas perekaman, jadwal pelaksanaan, sampai laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data.
 - 02 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan migrasi sistem aplikasi dan data mulai perencanaan migrasi, pelaksanaan migrasi, berita acara kegiatan migrasi, daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi, sampai laporan hasil migrasi.
 - 03 Layanan *Back-up* Data Digital
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan *back-up* data digital.
 - 04 Dokumen *Hosting*
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dokumen *hosting*.

XIII PW PENGAWASAN

00 Rencana Pengawasan

- 00 Rencana Strategis Pengawasan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan rencana strategis pengawasan.
- 01 Rencana Kinerja Tahunan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan rencana kinerja tahunan.
- 02 Penetapan Kinerja Tahunan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan penetapan kinerja tahunan.
- 03 Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional.

01 Pelaksanaan Pengawasan

- 00 Pengawasan Audit yang Memerlukan Tindak Lanjut
Naskah yang berkaitan dengan pengawasan audit yang memerlukan tindak lanjut, meliputi kegiatan pelaksanaan audit Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI).
- 01 Pengawasan Audit Investigasi yang Memerlukan Tindak Lanjut
Naskah yang berkaitan dengan pengawasan audit investigasi yang memerlukan tindak lanjut, meliputi kegiatan pelaksanaan audit investigasi Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi.
- 02 Pengawasan Audit yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut
Naskah yang berkaitan dengan pengawasan audit yang tidak memerlukan tindak lanjut, meliputi kegiatan pelaksanaan audit Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI).
- 03 Pengawasan Audit Investigasi yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut
Naskah yang berkaitan dengan pengawasan audit investigasi yang tidak memerlukan tindak lanjut, meliputi kegiatan pelaksanaan audit investigasi Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- 04 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
Naskah yang berkaitan dengan laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat, meliputi kegiatan pelaksanaan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat.
- 05 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
Naskah yang berkaitan dengan laporan pemutakhiran data tindak lanjut temuan.
- 06 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara (BMN)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan perkembangan BMN.
- 07 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu Instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
- 08 *Good Corporate Governance (GCG)*
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan *Good Corporate Governance (GCG)*.
- 09 Pengawasan Internal Bidang Kearsipan
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan internal bidang kearsipan.

B SUBSTANTIF

I DM KEDAULATAN MARITIM

- 00 Kebijakan Kedaulatan Maritim
Naskah yang berkaitan kebijakan kedaulatan maritim mulai proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang kedaulatan maritim.
- 01 Hukum dan Perjanjian
Naskah yang berkaitan dengan hukum dan perjanjian, meliputi peraturan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, hukum laut dan maritim nasional.
 - 01.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Hukum dan Perjanjian Kedaulatan Maritim
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang hukum dan perjanjian kedaulatan maritim, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional.
 - 01.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan pengendalian kebijakan meliputi isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional.
 - 01.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dibidang hukum dan perjanjian maritim.
- 02 Keamanan dan Ketahanan Maritim
Naskah yang berkaitan dengan keamanan dan ketahanan maritim meliputi keamanan dan pengawasan maritim, sumber daya ketahanan maritim, dan keamanan dan ketahanan pulau kecil, terluar dan terisolir.
 - 02.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang keamanan dan ketahanan maritim, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, sumber daya ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan pulau kecil, terluar dan terisolir.
 - 02.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan, meliputi isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, sumber daya ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan pulau kecil, terluar dan terisolir.
 - 02.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, sumber daya ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan pulau kecil, terluar dan terisolir.
- 03 Delimitasi Zona Maritim
Naskah yang berkaitan dengan delimitasi zona maritim meliputi pemetaan dan toponimi maritim, perundingan batas maritim dan penyelesaian sengketa, dan bidang ekstensi landas kontinen.
 - 03.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Delimitasi Zona Maritim
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang delimitasi zona maritim, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang pemetaan dan toponimi maritim,

- perundingan batas maritim, penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen.
- 03.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan meliputi isu di bidang pemetaan dan toponimi maritim, perundingan batas maritim dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen.
- 03.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan dan toponimi maritim, perundingan batas maritim dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen.
- 04 Navigasi dan Keselamatan Maritim
Naskah yang berkaitan dengan navigasi dan keselamatan maritim meliputi keselamatan navigasi nasional, keselamatan navigasi internasional, dan penanggulangan kecelakaan di laut.
- 04.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang navigasi dan keselamatan maritim, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang keselamatan navigasi nasional, keselamatan navigasi internasional dan penanggulangan kecelakaan di laut.
- 04.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan meliputi isu di bidang keselamatan navigasi nasional, keselamatan navigasi internasional dan penanggulangan kecelakaan di laut.
- 04.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang keselamatan navigasi nasional, keselamatan navigasi internasional dan penanggulangan kecelakaan di laut.

II AJ SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

- 00 Kebijakan Sumber Daya Alam dan Jasa
Naskah yang berkaitan kebijakan sumber daya alam dan jasa mulai dari proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang sumber daya alam dan jasa.
- 01 Sumber Daya Hayati
Naskah yang berkaitan dengan sumber daya hayati meliputi pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan keanekaragaman hayati.
- 01.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Sumber Daya Hayati
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang sumber daya hayati, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
- 01.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan meliputi isu di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
- 01.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang

pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

- 02 Sumber Daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional
Naskah yang berkaitan dengan sumber daya mineral, energi dan nonkonvensional meliputi pengelolaan sumber daya mineral, energi dan nonkonvensional.
- 02.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional.
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang sumber daya mineral, energi dan nonkonvensional, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan sumber daya nonkonvensional.
- 02.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan sumber daya nonkonvensional.
- 02.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan sumber daya nonkonvensional.
- 03 Jasa Kemaritiman
Naskah yang berkaitan dengan jasa kemaritiman meliputi jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari, dan pemanfaatan ruang laut.
- 03.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Jasa Kemaritiman
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang jasa kemaritiman, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari dan pemanfaatan ruang laut.
- 03.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan terkait dengan isu di bidang jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari dan pemanfaatan ruang laut.
- 03.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari dan pemanfaatan ruang laut.
- 04 Lingkungan dan Kebencanaan Maritim
Naskah yang berkaitan dengan lingkungan dan kebencanaan maritim meliputi pengelolaan lingkungan laut, pengelolaan kebencanaan maritim, dan perlindungan lingkungan laut.
- 04.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Lingkungan dan Kebencanaan Maritim
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang lingkungan dan kebencanaan maritim, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan laut, pengelolaan kebencanaan maritim dan perlindungan lingkungan laut.
- 04.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan laut, pengelolaan kebencanaan maritim dan perlindungan lingkungan laut.

- 04.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan laut, pengelolaan kebencanaan maritim dan perlindungan lingkungan laut.

III IS INFRASTRUKTUR

- 00 Kebijakan Infrastruktur
Naskah yang berkaitan kebijakan infrastruktur mulai proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang infrastruktur.
- 01 Konektivitas dan Sistem Logistik
Naskah yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik meliputi bidang tata ruang dan infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu dan pengembangan logistik maritim terpadu.
 - 01.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Konektivitas dan Sistem Logistik
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang konektivitas dan sistem logistik, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang tata ruang dan infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu dan pengembangan logistik maritim terpadu.
 - 01.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan terkait dengan isu di bidang tata ruang dan infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu dan pengembangan logistik maritim terpadu.
 - 01.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang tata ruang dan infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu dan pengembangan logistik maritim terpadu.
- 02 Pertambangan dan Energi
Naskah yang berkaitan dengan pertambangan dan energi, meliputi infrastruktur mineral dan batubara, infrastruktur minyak dan gas bumi, dan infrastruktur kelistrikan.
 - 02.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Pertambangan dan Energi
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang pertambangan dan energi, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur mineral dan batubara dan infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur kelistrikan.
 - 02.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan terkait dengan isu di bidang infrastruktur mineral dan batubara dan infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur kelistrikan.
 - 02.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang infrastruktur mineral dan batubara dan infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur kelistrikan.

- 03 Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata
Naskah yang berkaitan dengan pelayaran, perikanan dan pariwisata, meliputi infrastruktur pariwisata bahari, infrastruktur pengolahan produk perikanan, dan infrastruktur pelayaran rakyat.
 - 03.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang pelayaran, perikanan dan pariwisata, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur pariwisata bahari, infrastruktur pengolahan produk perikanan dan infrastruktur pelayaran rakyat.
 - 03.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan terkait dengan isu di bidang infrastruktur pariwisata bahari, infrastruktur pengolahan produk perikanan dan infrastruktur pelayaran rakyat.
 - 03.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang infrastruktur pariwisata bahari, infrastruktur pengolahan produk perikanan dan infrastruktur pelayaran rakyat.

- 04 Industri Penunjang Infrastruktur
Naskah yang berkaitan dengan industri penunjang infrastruktur, meliputi industri rekayasa, konstruksi dan instalasi, industri manufaktur, dan industri dasar.
 - 04.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Industri Penunjang Infrastruktur
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang industri penunjang infrastruktur, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang industri rekayasa, konstruksi dan instalasi, industri manufaktur dan industri dasar.
 - 04.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan terkait dengan isu di bidang industri rekayasa, konstruksi dan instalasi, industri manufaktur dan industri dasar.
 - 04.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri rekayasa, konstruksi dan instalasi, industri manufaktur dan industri dasar.

- IV MI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAN BUDAYA MARITIM
 - 00 Kebijakan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim
Naskah yang berkaitan dengan kebijakan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim, meliputi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim.
 - 01 Pendidikan dan Pelatihan Maritim
Naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan maritim, meliputi pendidikan kemaritiman, pelatihan teknis kemaritiman, dan sertifikasi profesi kemaritiman.
 - 01.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim

- Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang pendidikan dan pelatihan maritim, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan kemaritiman, pelatihan teknis kemaritiman dan sertifikasi profesi kemaritiman.
- 01.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan terkait dengan isu di bidang pendidikan kemaritiman, pelatihan teknis kemaritiman dan sertifikasi profesi kemaritiman.
- 01.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pendidikan kemaritiman, pelatihan teknis kemaritiman dan sertifikasi profesi kemaritiman.
- 02 Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim
Naskah yang berkaitan dengan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, meliputi integrasi sistem observasi kelautan, pemberdayaan perindustrian maritim, dan pengembangan ilmu pengetahuan energi baru dan terbarukan maritim.
- 02.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang integrasi sistem observasi kelautan, pemberdayaan perindustrian maritim, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi baru dan terbarukan maritim.
- 02.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan terkait dengan isu di bidang integrasi sistem observasi kelautan, pemberdayaan perindustrian maritim, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi baru dan terbarukan maritim.
- 02.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang integrasi sistem observasi kelautan, pemberdayaan perindustrian maritim, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi baru dan terbarukan maritim.
- 03 Budaya, Seni dan Olahraga Bahari
Naskah yang berkaitan dengan budaya, seni dan olahraga bahari, meliputi pengembangan seni dan budaya bahari, pengembangan olahraga maritim, dan penguatan karakter bangsa bahari.
- 03.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Budaya, Seni dan Olahraga Bahari
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang budaya, seni dan olahraga bahari, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan seni dan budaya bahari, pengembangan olahraga maritim dan penguatan karakter bangsa bahari.
- 03.01 Pengendalian Kebijakan
Naskah yang berkaitan dengan terkait dengan isu di bidang pengembangan seni dan budaya bahari, pengembangan olahraga maritim dan penguatan karakter bangsa bahari.
- 03.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan seni dan budaya bahari, pengembangan olahraga maritim dan penguatan karakter bangsa bahari.

04 Jejaring Inovasi Maritim

Naskah yang berkaitan dengan jejaring inovasi maritim seperti produk sumber daya alam maritim, pariwisata bahari, dan pelayaran rakyat.

03.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait dengan Bidang Jejaring Inovasi Maritim

Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan bidang jejaring inovasi maritim, meliputi perumusan yang terkait dengan isu di bidang jejaring inovasi produk sumber daya alam maritim, jejaring inovasi pariwisata bahari dan jejaring inovasi pelayaran rakyat.

03.01 Pengendalian Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan pengendalian kebijakan terkait dengan isu di bidang jejaring inovasi produk sumber daya alam maritim, jejaring inovasi pariwisata bahari dan jejaring inovasi pelayaran rakyat.

03.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan

Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang jejaring inovasi produk sumber daya alam maritim, jejaring inovasi pariwisata bahari dan jejaring inovasi pelayaran rakyat.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,



Latief Nurbana
NIP. 19620607 198711 1 001